

**ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN PAD, PDRB,  
DAN BELANJA MODAL TERHADAP *FISCAL STRESS*  
PADA KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI JAWA  
TENGAH**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)  
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis  
Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

**RIAN FIRSTANTO**  
**NIM. 12020110130082**

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS DIPONEGORO**  
**SEMARANG**  
**2015**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Rian Firstanto  
Nomor Induk Mahasiswa : 12020110130082  
Fakultas/ Jurusan : Ekonomi/ Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan  
Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN PAD,PDRB, DAN BELANJA MODAL TERHADAP *FISCAL STRESS* PADA KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH**  
Dosen Pembimbing : Firmansyah, SE., M.Si., Ph.D

Semarang, 4 Maret 2015

Dosen Pembimbing,

(Firmansyah, SE., M.Si., Ph.D)

NIP 19740427 199903 1001

## PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Mahasiswa : Rian Firstanto  
Nomor Induk Mahasiswa : 12020110130082  
Fakultas/ Jurusan : Ekonomika dan Bisnis / Ilmu Ekonomi dan Studi  
Pembangunan  
Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN PAD,  
PDRB, DAN BELANJA MODAL TERHADAP  
FISCAL STRESS PADA KABUPATEN DAN  
KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH**

**Telah dinyatakan lulus pada tanggal 20 Maret 2015**

Tim Penguji

1. Firmansyah, SE., M.Si., Ph.D (.....)
2. Drs. H. Edy Yusuf A. G., M.Sc., Ph.D (.....)
3. Dr. Hadi Sasana, SE., M.Si (.....)

Mengetahui,

Pembantu Dekan I,

Anis Chariri, SE., M.Com., Ph.D., Akt.

NIP. 19670809 199203 1001

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Rian Firstanto, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: “**ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN PAD, PDRB, DAN BELANJA MODAL TERHADAP *FISCAL STRESS* PADA KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH**”, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja atau tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai tulisan hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 4 Maret 2015

Yang membuat pernyataan,

(Rian Firstanto)

NIM 12020110130082

## ABSTRACT

*The purposes of this research are (1) to analyse and re-examine the influences of growth of Local Revenues (PAD), growth of Regional Gross Domestic Product (PDRB), and growth of Capital Expenditures to Fiscal Stress in Municipalities and Regencies in Central Java Province during a period of 2009 – 2013. (2) to analyse the influence of time variant to the Fiscal Stress in the observed period.*

*This study attempts to improve Iskandar Muda's study (2012) by replacing its Fiscal Stress variable measure with the one of the Fiscal Stress measures introduced by Arnett's study (2011). This present study employs panel data of Central Java consisting of 35 municipalities and regencies observed from 2009 till 2013. Fixed Effects Model (FEM) with Least Square Dummy Variable (LSDV) method is utilised to achieve the purposes.*

*Results of the study suggest that the growth of PAD, growth of PDRB, and the the growth of Capital Expenditures have simultaneously significant influences to the Fiscal Stress. Individually, only Capital Expenditure Growth has significantly negative impact on the Fiscal Stress, whereas the growth of PAD and the PDRB growth have no significant impacts on the Fiscal Stress. The significant finding indicates that the higher the growth of Capital Spending, the lesser the Fiscal Stress is. Interestingly, this study results in a different output from the previous study of Iskandar Muda (2012) which suggested that there was no significant impact of the Capital Spending growth on the Fiscal Stress. This study's significant finding may imply that the growth of Capital Spendings will create potential or expected revenues in the future. Consequently, it may lead to lessening in the Fiscal Stress.*

*With year of 2012 as a benchmark, the study's findings also suggest that the Fiscal Stress in the periods of 2009 - 2013 were significantly different from the 2012 Fiscal Stress benchmark.*

***Keywords: Fiscal Stress, growth of Local Revenues (PAD, growth of Regional Gross Domestic Product (PDRB), growth of Capital Expenditures***

## ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) menganalisis dan mengkaji kembali pengaruh pertumbuhan Pendapatan Daerah (PAD), pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan pertumbuhan Belanja Modal terhadap *Fiscal Stress* pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2009-2013. (2) menganalisis pengaruh perbedaan (dinamika) waktu terhadap *Fiscal Stress* pada periode waktu yang diamati: 2009-2013.

Penelitian ini berupaya memperbaiki penelitian Iskandar Muda (2012) dengan mengganti ukuran variable operasional *Fiscal Stress* nya dengan salah satu ukuran yang diperkenalkan oleh Arnett (2011). Penelitian ini menggunakan data panel dari Jawa Tengah yang terdiri dari 35 kota dan kabupaten yang diamati selama 5 tahun (2009 – 2013). Model Fixed Effect (FEM) dengan metode Least Square Dummy Variable (LSDV) digunakan untuk menganalisis dan menjawab tujuan penelitian di atas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan PAD, pertumbuhan PDRB, dan pertumbuhan Belanja Modal secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Fiscal Stress*. Secara parsial, pertumbuhan PAD dan pertumbuhan PDRB tidak berdampak signifikan terhadap *Fiscal Stress*; hanya Pertumbuhan Belanja Modal saja yang memiliki dampak negatif pada *Fiscal Stress*. Temuan signifikan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi pertumbuhan belanja modal, semakin rendah *Fiscal Stress*. Hal ini dapat diartikan bahwa pertumbuhan Belanja Modal akan menciptakan potensi penerimaan pemerintah daerah di masa yang akan datang. Menariknya, studi ini menghasilkan temuan yang berbeda dengan temuan studi sebelumnya (Iskandar Muda, 2012) yang menyebutkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara pertumbuhan belanja modal dengan *Fiscal Stress*.

Dengan tahun 2012 sebagai patokan, hasil studi juga menunjukkan bahwa *Fiscal Stress* dalam periode waktu 2009 sampai dengan 2013 secara signifikan berbeda dengan *Fiscal Stress* yang terjadi di tahun 2012.

**Kata kunci:** *Fiscal Stress*, pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pertumbuhan Belanja Modal

## KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Tuhan atas karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Pengaruh Pertumbuhan PAD, PDRB, dan Belanja Modal terhadap *Fiscal Stress* pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah”. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana Strata S1 Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari bahwa selama penyusunan skripsi ini banyak hambatan, namun berkat dengan doa, bimbingan, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Tuhanku Yesus Kristus, atas berkat dan karunia-Nya yang telah memberikan kekuatan pada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Orang tuaku: almarhum ayah Rantiyo, mama Johanna Kodoatie Cahill dan Steve Cahill, atas kasih sayang, doa, bimbingan, dan motivasi yang selalu diberikan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Dr. Suharnomo, SE., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis.
4. Dr. Hadi Sasana, SE., M.Si. selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan.
5. Firmansyah, S.E., M.Si., Ph.D. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, motivasi dan masukan serta saran yang sangat berguna bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Evi Yulia Purwanti, S.E., M.Si. selaku dosen wali yang banyak memberikan bimbingan, arahan dan motivasi selama menjalani studi di Fakultas Ekonomika dan Bisnis.

7. Bapak dan ibu Dosen Jurusan IESP Fakultas Ekonomika dan Bisnis yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Universitas Diponegoro.
8. Segenap staf administrasi dan staf perpustakaan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, atas bantuannya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Ineke Akies dan keluarga yang telah memberikan doa, semangat, motivasi dan arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Para sahabat penulis yaitu Reza, Bagus, Pipit, Tito, Desi dan Ari yang selalu menemani, memotivasi dan memberi pelajaran berharga selama menjalani studi di Fakultas Ekonomika dan Bisnis.
11. Tutut, Reza, Pandu yang telah membantu dan menemani dalam pengerjaan skripsi ini.
12. Para Sahabat Gereja yang selalu menemani dan memotivasi, Indra, Deon, Donny, Cik Fanny, Anna, dan teman-teman lainnya.
13. Sahabat KKN, Novan, Angga, Benny, Jimny, Pani, Abika, Renny, Hanum, Vero yang telah memberikan motivasinya karena telah lulus sebelum penulis menyelesaikan skripsi ini.
14. Teman Teman IESP angkatan 2010, HMJ IESP yang telah memberikan banyak pelajaran hidup selama berada di kampus tercinta.

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kelemahan, oleh karena itu, penulis sangat menghargai dan berterimakasih atas saran dan kritik konstruktif yang diberikan guna kesempurnaan skripsi ini.

Semarang, 4 Maret 2015

Penulis

Rian Firstanto

## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN SKRIPSI .....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN .....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	iv
ABSTRACT .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	10
2.1 Kegagalan Pasar .....	10
2.2 Peran Pemerintah.....	13
2.3 Penerimaan Pemerintah .....	16
2.3.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	16
2.3.1.1 Perpajakan.....	16
2.3.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	18
2.4 Pengeluaran Pemerintah .....	19
2.4.1 Belanja Modal.....	20
2.5 Teori Peacock Wiseman .....	22
2.6 Tekanan Fiskal ( <i>Fiscal Stress</i> ).....	26
2.6.1 Pengaruh pertumbuhan PAD terhadap <i>Fiscal Stress</i> .....	29

2.6.2 Pengaruh pertumbuhan Belanja Modal terhadap <i>Fiscal Stress</i> .....	30
2.6.3 Pengaruh pertumbuhan PDRB terhadap <i>Fiscal Stress</i> .....	31
2.7 Review Penelitian Terdahulu .....	32
2.8 Kerangka Pemikiran .....	36
2.9 Hipotesis Penelitian.....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
3.1 Definisi Operasional dan Variabel Penelitian .....	39
3.2 Jenis dan Sumber Data .....	43
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	43
3.4 Metode Analisis .....	44
3.4.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	44
3.4.2 Analisis Regresi Berganda .....	44
3.4.3 Analisis Regresi Data Panel .....	45
3.4.3.1 Analisis Regresi Panel Data dengan <i>Dummy Variable</i> .....	47
3.4.3.2 Uji Penyimpangan Asumsi Klasik.....	48
3.4.3.2.1 Uji Normalitas.....	49
3.4.3.2.2 Uji Multikolinearitas .....	49
3.4.3.2.3 Uji Autokorelasi.....	50
3.4.3.2.4 Uji Heteroskedastisitas.....	51
3.4.4 Pengujian Statistik dan Hipotesis.....	52
3.4.4.1 Uji <i>Goodness of fit</i> ( $R^2$ ).....	52
3.4.4.2 Uji signifikansi simultan (Uji F) .....	52
3.4.4.3 Uji signifikansi parsial (Uji t) .....	53
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>55</b>
4.1 Deskripsi Objek Penelitian .....	55
4.2 Analisis Data.....	57
4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	57
4.2.2 Analisis Regresi Data Panel .....	59

4.2.2.1 Uji Normalitas .....	59
4.2.2.1 Uji Multikolinieritas.....	61
4.2.2.1 Uji Autokorelasi.....	62
4.2.2.1 Uji Heteroskedastisitas.....	63
4.2.3 Hasil Pengujian Statistik dan Hipotesis .....	64
4.2.3.1 Uji <i>Goodness of fit</i> ( $R^2$ ).....	64
4.2.3.2 Uji signifikansi simultan (Uji F).....	65
4.2.3.3 Uji signifikansi parsial (Uji t).....	66
4.3 Interpretasi Hasil .....	67
4.3.1 Pengaruh Pertumbuhan PAD, PDRB, dan Belanja Modal terhadap <i>Fiscal Stress</i> .....	67
4.3.2 Pengaruh perbedaan waktu terhadap <i>Fiscal Stress</i> .....	69
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	71
5.1 Kesimpulan .....	71
5.2 Keterbatasan.....	73
5.3 Saran dan agenda penelitian mendatang. ....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	76
<b>Lampiran</b> .....	79

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Kondisi Keuangan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2013.....	4
Tabel 2.1	Review Penelitian Terdahulu.....	33
Tabel 4.1	Statistik Deskriptif.....	57
Tabel 4.2	Uji Multikolinearitas.....	61
Tabel 4.3	Uji Autokorelasi Breusch Godfrey.....	62
Tabel 4.4	Uji Heteroskedastisitas Glejser.....	63
Tabel 4.5	Uji <i>Goodness of fit</i> ( $R^2$ ).....	64
Tabel 4.6	Uji F.....	65
Tabel 4.7	Nilai t Statistik dan Koefisien.....	66
Tabel 4.8	Hasil Analisis Regresi Data Panel dengan LSDV.....	70

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Inefisiensi Alokasi Sumber Daya sebagai Wujud Kegagalan Pasar...	11
Gambar 2.2	Kurva IS-LM.....	19
Gambar 2.3	Kurva Peacock Wiseman.....	24
Gambar 2.4	Kurva Perkembangan Pengeluaran Pemerintah.....	25
Gambar 2.5	Spektrum Kondisi Keuangan Publik.....	27
Gambar 4.1	Grafik Pertumbuhan PAD, PDRB, dan Belanja Modal.....	55
Gambar 4.2	Uji Normalitas Jarque Bera.....	60

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Data Variabel Penelitian.....	80
Lampiran II	Analisis Data.....	85
Lampiran III	Hasil Analisis Regresi Data Panel <i>LSDV</i> .....	88

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu faktor penentu tingkat kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu menggambarkan kondisi kemakmuran masyarakatnya, mengingat bahwa pertumbuhan ekonomi hanya mencerminkan bagaimana “kue pembangunan” diperbesar, tapi belum menggambarkan bagaimana “kue pembangunan” tersebut didistribusikan secara merata dalam rangka kesejahteraan masyarakat.

Masalah pertumbuhan ekonomi sudah menarik minat para ahli-ahli ekonomi sejak era Adam Smith sampai dengan para ahli ekonomi dewasa ini terutama masalah pertumbuhan ekonomi di negara-negara yang sedang berkembang, salah satunya adalah Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia memang cukup tinggi, akan tetapi efek penyerapan tenaga kerja dalam masyarakat masih cukup rendah. Fakta tersebut didukung oleh studinya Adi (2011) yang menyatakan bahwa setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya menyerap 250 ribu tenaga kerja baru (Adi, 2011).

Pada tahun 2004, Pemerintah mengeluarkan UU no. 32 dan 34 mengenai adanya kewenangan daerah dan sebagai implikasinya adalah adanya desentralisasi fiskal. Kebijakan ini merupakan tantangan bagi pemerintah daerah untuk mengelola

sumber daya yang ada di daerahnya secara lebih efisien. Daerah-daerah yang memiliki potensi sumber daya masing-masing mendapat kebebasan untuk meningkatkan kreatifitas dalam mengelola dan mengembangkan potensi sumber daya daerahnya. Namun di sisi lain, akibat kebijakan ini dimungkinkan dapat menjurus pada disparitas (ketimpangan) yang tinggi di setiap daerah.

Beberapa studi terdahulu menunjukkan bahwa hubungan antara desentralisasi dengan pertumbuhan ekonomi berbeda-beda. Davoodi dan Zou (1998) dengan data panel 46 negara berkembang dan maju di periode 1970-1989 menemukan bahwa desentralisasi menyebabkan pertumbuhan ekonomi rendah. Sementara itu, Ebel dan Yilmaz, dalam Wibowo 2008 menemukan hubungan positif antara desentralisasi dan pertumbuhan ekonomi. Di Indonesia, Swasono (2005) menemukan adanya dampak negatif desentralisasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Bila ditelusuri dampak desentralisasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketidakmerataan antar daerah meliputi beberapa aspek (Swasono, 2005). Pertama, aspek transfer karena hal ini akan berimplikasi pada besarnya transfer pemerintah pusat ke daerah. Ke dua, kompetensi pejabat lokal yang mempengaruhi keputusan pengalokasian anggaran belanja. Ke tiga, kapasitas lokal, ketersediaan kerangka institusional, kepastian hukum dan dukungan administrasi pemerintah daerah. Ke empat, sumber daya alam dan lokasi strategis daerah dalam konteks nasional mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi daerah.

Adanya desentralisasi tentu akan mendorong terjadinya disparitas fiskal mengingat setiap daerah memiliki kesiapan yang berbeda-beda baik dari segi potensi

sumber daya maupun kemampuan manajerial keuangan daerahnya. Nanga (2005) menunjukkan adanya disparitas fiskal yang tinggi antar daerah yang memasuki era otonomi. Beberapa daerah tergolong sebagai daerah yang beruntung karena memiliki sumber-sumber penerimaan yang potensial, seperti pajak, retribusi daerah, dan ketersediaan sumber daya yang memadai sehingga dapat dijadikan sebagai sumber penerimaan daerah. Di sisi lain, otonomi dapat mendorong upaya kemandirian daerah sehingga pada gilirannya memicu suatu daerah mengalami tekanan fiskal (*Fiscal Stress*) yang lebih tinggi dibandingkan pada masa sebelum era otonomi. Daerah dituntut untuk mengoptimalkan setiap potensi maupun kapasitas fiskalnya dalam rangka untuk mengurangi tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Konsekuensinya, tekanan fiskal (*Fiscal Stress*) yang tinggi akan berdampak pada kinerja keuangan pemerintah dalam mengatur dan mengalokasikan anggarannya untuk pembangunan daerah.

Pembiayaan pembangunan daerah bersumber pada PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Penurunan kegiatan ekonomi di berbagai daerah dapat juga menyebabkan penurunan PAD sehingga daerah tersebut akan bergantung pada dana perimbangan yang akan menimbulkan gejala tekanan fiskal (*Fiscal Stress*). Berikut disajikan Tabel 1.1 yang menggambarkan kondisi keuangan pemerintah daerah (termasuk tekanan fiskal) di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2013.

**Tabel 1.1**  
**Kondisi Keuangan Pemerintah Kab/Kota di Jawa Tengah th. 2013 (Jutaan Rp)**

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>PAD</b>	<b>Total Transfer</b>	<b>Belanja Daerah</b>	<b>PAD + Transfer</b>	<b>PAD (%)</b>	<b>Transfer / Belanja (%)</b>
Kab. Banjarnegara	76518	875159	1234964	951678	8,04	70,87
Kab. Banyumas	229194	1255986	2098444	1485180	15,43	59,85
Kab. Batang	83242	723747	1049361	806989	10,32	68,97
Kab. Blora	77000	888091	1385468	965091	7,98	64,1
Kab. Boyolali	142677	967114	1422890	1109790	12,86	67,97
Kab. Brebes	107109	1249403	1890997	1356512	7,9	66,07
Kab. Cilacap	191853	1368102	2073241	1559955	12,3	65,99
Kab. Demak	100415	864870	1312467	965285	10,4	65,9
Kab. Grobogan	101117	1055226	1536803	1156343	8,74	68,66
Kab. Jepara	110489	933847	1351036	1044336	10,58	69,12
Kab. Karanganyar	121180	882004	1346189	1003184	12,08	65,52
Kab. Kebumen	104722	1131747	1634459	1236468	8,47	69,24
Kab. Kendal	107395	921517	1383805	1028911	10,44	66,59
Kab. Klaten	82921	1168763	1628485	1251685	6,62	71,77
Kab. Kudus	138912	930992	1294480	1069904	12,98	71,92
Kab. Magelang	124152	1004487	1511729	1128639	11	66,45
Kab. Pati	134962	1085387	1775345	1220349	11,06	61,14
Kab. Pekalongan	127126	853708	1220443	980834	12,96	69,95
Kab. Pemasang	92422	1030360	1476290	1122782	8,23	69,79
Kab. Purbalingga	101376	830726	1127382	932102	10,88	73,69
Kab. Purworejo	109488	875620	1258566	985108	11,11	69,57
Kab. Rembang	110867	734618	1121778	845485	13,11	65,49
Kab. Semarang	166506	861583	1137175	1028088	16,2	75,77
Kab. Sragen	105574	975950	1378179	1081525	9,76	70,81
Kab. Sukoharjo	154068	851119	1274312	1005187	15,33	66,79
Kab. Tegal	124014	1069038	1475011	1193052	10,39	72,48
Kab. Temanggung	84226	726063	1102507	810288	10,39	65,86
Kab. Wonogiri	87845	1038703	1510810	1126548	7,8	68,75
Kab. Wonosobo	72795	745778	1100870	818573	8,89	67,74
Kota Magelang	79890	427096	617028	506986	15,76	69,22
Kota Pekalongan	79069	451681	638975	530750	14,9	70,69
Kota Salatiga	67830	419957	655344	487788	13,91	64,08
Kota Semarang	714027	1201037	2657023	1915064	37,28	45,2
Kota Surakarta	262906	722287	1402670	985193	26,69	51,49
Kota Tegal	148202	420019	690948	568220	26,08	60,79

Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Tengah (Diolah)

Tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa kontribusi PAD terhadap penerimaan daerahnya di kota dan kabupaten di Jawa Tengah tahun 2013 adalah relatif kecil, yaitu kurang dari 30% (6,62% - 26,69%), sedangkan dana transfer sangat mendominasi kontribusinya terhadap belanja daerah, yaitu 45,2% - 75,77%. Dominasi ini tentu saja akan berpengaruh buruk pada jangka panjang, mengingat belanja daerah akan semakin meningkat dari tahun ke tahun dalam rangka mendorong penyelenggaraan pembangunan di setiap daerah. Jika hal ini tidak diikuti dengan peningkatan PADnya, maka ketergantungan pada dana dari pusat (dana transfer) akan memicu terjadinya fenomena yang disebut *Fiscal Stress*.

Menurut Arnett (2011), tidak ada satu definisipun tentang *Fiscal Stress* yang diterima secara universal. Artinya, para peneliti sering menciptakan definisi sendiri untuk mengakomodasi fokus penelitian atau memodifikasi definisi yang digunakan oleh penelitian sebelumnya (Jimenez 2009; Rubin and Willoughby 2009; Sobel and Holcombe 1996a; Maag and Merriman 2007; Alm et al 1993; Rubin 1982 dalam Arnett (2011)).

Arnett (2011) mendefinisikan *Fiscal stress* sebagai ketidak mampuan pemerintah (daerah) untuk memenuhi kewajiban finansial baik jangka pendek dan jangka panjangnya termasuk ketidak mampuan meningkatkan penerimaan daerahnya ataupun menyediakan barang dan jasa (pelayanan) publik yang dibutuhkan warga masyarakatnya.

Studi tentang *Fiscal Stress* di tingkat daerah menjadi semakin penting, terutama pada era otonomi daerah dimana daerah dituntut untuk mampu menyelenggarakan

pemerintahannya berikut penyediaan barang dan pelayanan publik bagi warga masyarakatnya. Upaya untuk meningkatkan penerimaan daerah dengan menggali penerimaan baru harus terus dilakukan dalam rangka menutupi anggaran belanja daerah yang semakin meningkat setiap tahunnya.

Studi terdahulu yang dilakukan oleh Haryadi (2002) menunjukkan bahwa *Fiscal Stress* secara signifikan berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah di Kabupaten/Kota di Jawa Timur sebelum dan sesudah krisis, tingkat kemampuan pembiayaan daerah sebelum krisis relatif lebih besar dibandingkan sesudah krisis. Penelitian lain yang terkait dilakukan oleh Andayani (2004) menunjukkan bahwa terjadi perubahan rata-rata pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota sebelum dan sesudah adanya krisis. Rata-rata pendapatan dan belanja daerah mengalami penurunan yang signifikan pada masa terjadinya krisis. Penerimaan daerah yang tidak stabil menyebabkan terjadinya *Fiscal Stress*, sehingga terjadi penurunan rata-rata pendapatan dan belanja daerah.

Studi yang dilakukan oleh Iskandar Muda (2012) menjelaskan bahwa pertumbuhan PAD, pertumbuhan PDRB dan pertumbuhan Belanja Modal secara simultan berpengaruh pada *Fiscal Stress* di Sumatera Utara pada periode tahun 2004 - 2009. Secara parsial, hanya pertumbuhan PAD yang berpengaruh pada *Fiscal Stress*, sedangkan variabel independen lainnya tidak berpengaruh.

Penelitian ini merupakan upaya memperbaiki hasil studi penelitian Iskandar Muda (2012) dengan mengganti indikator/ukuran variabel operasional *Fiscal Stress* dengan ukuran yang diperkenalkan oleh Arnett (2011), yaitu Saldo Dana (*Fund*

*Balance*). Arnett (2011) menyebutkan *Fund Balance* (Saldo Dana = selisih antara penerimaan dan pengeluaran) sangat diberi bobot dalam penentuan indikator (ukuran) *Fiscal Stress* karena dianggap mewakili kemampuan pemerintah untuk terus bertahan beroperasi meskipun dalam kondisi ekonomi yang sulit sekalipun. Pemerintah daerah mungkin harus berjuang dalam menghadapi permasalahan finansial, tetapi mereka masih mampu bertahan beroperasi jika memiliki saldo dana yang memadai untuk menyerap dampak negatif dari permasalahan finansial tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kembali fenomena *Fiscal Stress* dengan menggunakan model dan variabel – variabel yang sama yang digunakan oleh penelitian Iskandar Muda (2012). Hanya saja perbedaanya adalah: lokasi penelitian dilakukan di Jawa Tengah pada kurun waktu yang lebih *uptodate* (2009 – 2013). Yang lebih penting adalah ukuran (indikator) *Fiscal Stress* yang digunakan adalah selisih antara PAD dengan Total Belanja Daerah – hasil modifikasi dari *Fund Balance* yang diperkenalkan oleh Arnett (2011) serta memanfaatkan Analisis Regresi Data Panel dengan *Fixed Effect Model* (FEM) atau *Least Square Dummy Variable* (LSDV).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas pertanyaan penelitian yang perlu dijawab dalam studi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi (PDRB) terhadap tingkat tekanan fiskal (*Fiscal Stress*) pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah?

2. Bagaimana pengaruh pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap tingkat tekanan fiskal (*Fiscal Stress*) pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah?
3. Bagaimana pengaruh pertumbuhan tingkat belanja modal/pembangunan terhadap tekanan fiskal (*Fiscal Stress*) pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah?
4. Bagaimana perbedaan (dinamika) waktu berpengaruh terhadap *Fiscal Stress* pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan bagaimana *Fiscal Stress* di Jawa Tengah berikut dinamikanya pada kurun waktu 2009 – 2013 yang dicerminkan oleh selisih (gap) antara PAD dan Total Belanja Daerah.
2. Menganalisis dan mengkaji kembali:
  - a. Bagaimana pengaruh PAD terhadap *Fiscal Stress* pada kabupaten dan kota di Jawa Tengah pada kurun waktu 2009 - 2013
  - b. Bagaimana pengaruh pertumbuhan PDRB terhadap *Fiscal Stress* pada kabupaten dan kota di Jawa Tengah pada kurun waktu 2009 - 2013
  - c. Bagaimana pengaruh pertumbuhan Belanja Modal terhadap *Fiscal Stress* di Jawa Tengah pada kurun waktu 2009 - 2013.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi banyak pihak, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Sebagai informasi dan masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan untuk mengatasi masalah tekanan anggaran (*Fiscal Stress*) di Kabupaten/Kota pada Provinsi Jawa Tengah.
2. Sebagai sarana untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam kemajuan ilmu pengetahuan khususnya dalam pengembangan dan aplikasi teori-teori ekonomi
3. Memperkaya ilmu pengetahuan di bidang keuangan daerah sehingga dapat digunakan sebagai informasi untuk penelitian berikutnya.

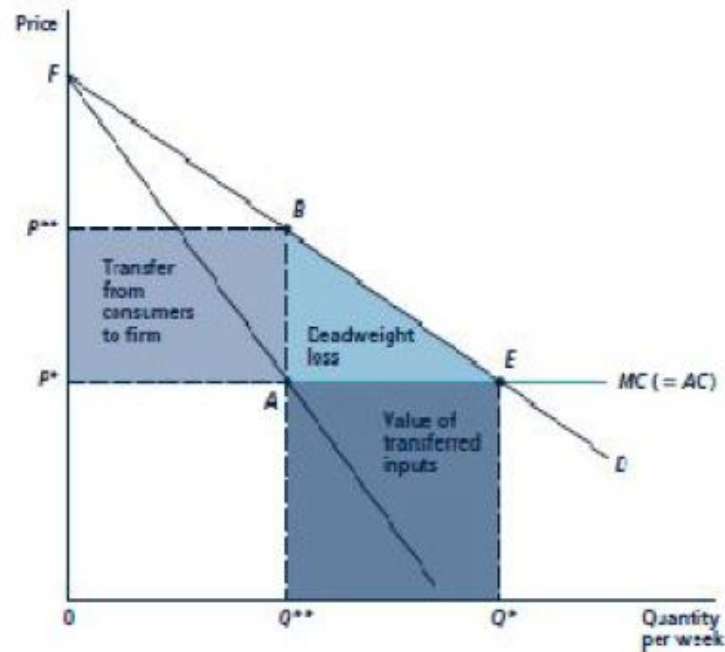
## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Kegagalan Pasar

Pengertian kegagalan pasar secara sederhana identik dengan kegagalan pasar dalam mencapai efisiensi alokasi sumber daya pada masyarakat. Namun pengertian ini tidak mutlak, tergantung dengan tujuan bagaimana suatu sistem yang diterapkan. Sebagaimana Jepang mengartikan kegagalan pasar sebagai kondisi dimana mekanisme pasar tidak mampu mencapai tujuan yang ditetapkan pemerintah, sehingga pasar menjadi tidak memadai dalam penyediaan infrastruktur dasar, pemenuhan kebutuhan dasar, dan pengiriman layanan penting bagi masyarakat.

Teori tradisional kegagalan pasar menggambarkan kegagalan pasar sebagai kondisi dimana terjadi kerugian atau kehilangan alokasi atau efisiensi. Hasil dari pasar tidak optimal atau kurang efisien sehingga menyebabkan eksternalitas. Stiglitz (1997a. p. 64) mencatat adanya tiga tipe pasar yang tidak efisien, yaitu: (1) *product mix inefficiency*, dimana pasar memproduksi sangat banyak satu barang dan sedikit barang yang lain, (2) *exchange inefficiency*, dimana beberapa barang yang diproduksi di pasar tidak mampu mencapai keinginan dari individu, dan (3) *production inefficiency*, ketika produksi suatu barang menjauhi dari batas kemungkinan produksi.



**Gambar 2.1**

**Inefisiensi Alokasi Sumber Daya Sebagai Wujud Kegagalan Pasar**

Gambar di atas menunjukkan salah satu inefisiensi alokasi sumber daya akibat perilaku monopolis di pasar monopoli. Keberadaan monopoli mendistorsi alokasi sumber daya. Monopoli secara sengaja membatasi produksi mereka dalam rangka untuk memaksimalkan keuntungan. Dari grafik tersebut dapat dilihat, bahwa monopoli memproduksi barang jauh lebih kecil seperti yang terjadi pada pasar persaingan sempurna yaitu sebesar  $Q^{**}$ . Selisih  $(Q^{**} - Q^*)$  mencerminkan ketidak efisienan atau munculnya *deadweight loss*, yaitu hilangnya bagian surplus konsumen.

Selisih antara harga dan biaya marginal menunjukkan bahwa pada tingkat output yang memaksimalkan keuntungan, konsumen mau untuk membayar lebih mahal untuk unit tambahan dari pada biaya untuk memproduksi output tersebut.

Dewasa ini boleh dikatakan tidak ada satu negarapun yang aktivitas ekonominya bebas dari campur tangan pemerintah. Kecenderungan tersebut juga terjadi di negara yang perekonomiannya paling liberal atau kapitalis sekalipun. Bila dilihat sejarah ke belakang hal ini merupakan siklus yang terus berputar, pada masa Merkantilisme dimana peran pemerintah cukup dominan dalam perekonomian mengalami kegagalan yang ditandai dengan lahirnya teori Klasik Adam Smith. Kemudian diganti dengan peran swasta yang begitu dominan dalam perekonomian suatu negara. Namun peran swasta tersebut juga menemui kegagalan yang dikenal sebagai kegagalan pasar (*market failure*). Hal ini ditandai dengan adanya depresi besar akibat mekanisme pasar yang tidak berjalan sebagai mestinya, yang pada akhirnya pemerintah diharapkan untuk memainkan peran dalam perekonomian. Dengan kata lain peran pemerintah tetap diperlukan, bukan dihapuskan. Peran pemerintah yang semakin besar dalam perekonomian tidak dapat dilepaskan dari kegagalan pasar (*market failure*). Kegagalan pasar inilah yang pada mulanya menjadi latar belakang dirasa perlunya campur tangan pemerintah. Mekanisme pasar melalui *invisible hand* dinilai tidak mampu secara efisien dan efektif dalam menjalankan fungsinya yang menurut Weimer dan Vining (1992) adalah merupakan kegagalan pasar tradisional. Namun kegagalan pasar hanyalah salah satu sebab mengapa

pemerintah harus turun tangan dalam perekonomian agar kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara optimal (Mangkusoebroto, 1999). Kegagalan pasar barulah merupakan syarat perlu (*necessary condition*) bagi campur tangan pemerintah. Barton (2000) menyebutkan pula bahwa dalam ekonomi pasar yang dikendalikan oleh pemerintahan yang dipilih secara demokratis, hanya ada dua alasan bagi pemerintah untuk masuk ke dalam aktivitas masyarakat, yaitu: *social equity* dan kegagalan pasar. Berdasarkan alasan-alasan itu, secara garis besar peran pemerintah dengan *public policies*-nya adalah mengoreksi kegagalan pasar untuk memperbaiki efisiensi produksi dan alokasi sumber daya dan barang, serta merelokasi oportunitas dan barang untuk mencapai nilai-nilai distribusional dan nilai-nilai lainnya (Weimer dan Vining, 1992).

## **2.2 Peran Pemerintah**

Dalam setiap sistem perekonomian, apakah sistem perekonomian kapitalis atau sistem perekonomian sosialis, pemerintah senantiasa mempunyai peranan yang penting. Peranan pemerintah yang sangat besar dalam sistem perekonomian sosialis dan sangat terbatas dalam sistem perekonomian kapitalis murni seperti yang dikemukakan oleh Adam Smith. Adam Smith mengemukakan bahwa fungsi pemerintah hanya terbatas pada kegiatan:

- 1) memelihara keamanan dalam negeri dan pertahanan.
- 2) menyelenggarakan peradilan.

- 3) menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta, seperti misalnya jalan dan bendungan.

Dapat dipahami bahwa dengan kemajuan-kemajuan dan perkembangan di setiap negara, tidak ada satu pun negara kapitalis di dunia ini yang melaksanakan sistem kapitalis murni. Dalam dunia modern, pemerintah diharapkan perannya semakin besar mengatur jalannya perekonomian.

Adam Smith, konseptor sistem kapitalis murni, mengemukakan ideologinya karena dia menganggap bahwa dalam perekonomian kapitalis, setiap individu yang paling tahu apa yang paling baik bagi dirinya, sehingga dia akan melaksanakan apa yang dianggap terbaik bagi dirinya sendiri. Prinsip kebebasan ekonomi dalam prakteknya menghadapi benturan kepentingan, karena tidak adanya koordinasi yang menimbulkan harmonis dalam kepentingan masing-masing individu. Dalam hal ini pemerintah mempunyai peranan untuk mengatur, memperbaiki atau mengarahkan aktivitas sektor swasta. Dalam perekonomian modern, peranan pemerintah dapat diklasifikasikan dalam 3 golongan besar, yaitu:

- 1) Peranan alokasi
- 2) Peranan distribusi, dan
- 3) Peranan stabilisasi.

Sementara itu, Barton (2000) menyebutkan peran utama pemerintah secara garis besar adalah: 1) peran alokasi sumber daya, 2) peran regulator, 3) peran

kesejahteraan sosial, 4) peran mengelola ekonomi makro. Penjelasan keempat peran pemerintah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dalam peran alokasi sumber daya tercakup soal penentuan ukuran absolut dan relatif pemerintah dalam perekonomian (keseimbangan sektor publik dan sektor swasta) dan penyediaan barang-barang publik serta pelayanan kesejahteraan sosial bagi masyarakat.

2. Peran regulator. Hal ini mencakup undang-undang dan tata tertib yang dibutuhkan masyarakat termasuk undang-undang yang mengatur dunia bisnis yang memadai untuk memfasilitasi aktivitas bisnis dan hak-hak kepemilikan pribadi.

3. Peran kesejahteraan sosial. Mencakup kebijakan-kebijakan yang mendorong pemerataan sosial di negara yang bersangkutan seperti perpajakan, jaminan sosial (*transfer payment*) dan penyediaan sejumlah barang publik campuran bagi masyarakat.

4. Peran mengelola ekonomi makro yang memfasilitasi stabilitas secara umum dan kemakmuran ekonomi negara melalui kebijakan-kebijakan yang didesain untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil, *full employment*, inflasi yang rendah, dan stabilitas neraca pembayaran.

## **2.3 Penerimaan Pemerintah**

### **2.3.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator dalam mengukur tingkat kemandirian suatu daerah otonom dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pembangunan daerah tersebut. Sejalan dengan itu, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber keuangannya sendiri, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya (Koswara, 2000). Sumber dari PAD sendiri terdiri dari 1) Penerimaan pajak, 2) Penerimaan retribusi, 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan 4) Lain-lain PAD yang sah. Sumber-sumber PAD tersebut memberikan kontribusi yang berbeda-beda terhadap penerimaan PAD secara keseluruhan, namun kontribusi terbesar dalam penerimaan PAD berasal dari pajak daerah.

#### **2.3.1.1 Perpajakan**

Perpajakan merupakan sumber utama pendapatan pemerintah untuk membayar barang dan jasa yang dihasilkannya. Tujuan utama dari beberapa prinsip umum perpajakan dan mengevaluasinya adalah untuk memahami dampak dari sumber berbagai pajak yang digunakan untuk membiayai pemerintah. Untuk sepenuhnya memahami dampak dari pajak atas ekonomi, sistem pajak harus

dianalisis secara keseluruhan karena efek dari satu jenis pajak akan tergantung pada bagaimana pajak yang berinteraksi dengan ketentuan jenis pajak lainnya.

Pajak merupakan pungutan yang dipaksakan oleh pemerintah untuk tujuan-tujuan tertentu. Misalnya untuk membiayai penyediaan barang dan jasa publik, untuk mengatur perekonomian dan juga untuk mengatur konsumsi masyarakat. Karena sifatnya yang dipaksakan tersebut maka pajak akan mempengaruhi perilaku ekonomi masyarakat atau seseorang.

Pajak merupakan modal dasar pembangunan. Lebih dari dua pertiga modal dasar pembangunan adalah berasal dari pajak. Mekanisme bekerjanya sistem pajak seperti ini dapat dijelaskan seperti berikut. Pada saat pemerintah melakukan belanja barang dan jasa terjadi aliran pendapatan dari pemerintah ke dalam masyarakat. Termasuk juga dalam hal ini beberapa *multiplier effect* dalam bentuk, misalnya *employment creation* dan peningkatan output. Kenaikan pendapatan masyarakat ini akan merangsang peningkatan permintaan dan dalam kondisi penawaran yang relatif terbatas akan terjadi kecenderungan kenaikan harga (untuk selanjutnya mengarah pada inflasi). Dalam situasi seperti ini sebagian dari pendapatan masyarakat yang meningkat itu diambil oleh pemerintah melalui pajak untuk membiayai defisit anggaran berikutnya. Hal inilah yang dikatakan sebagai *forced saving*, yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk pembentukan modal.

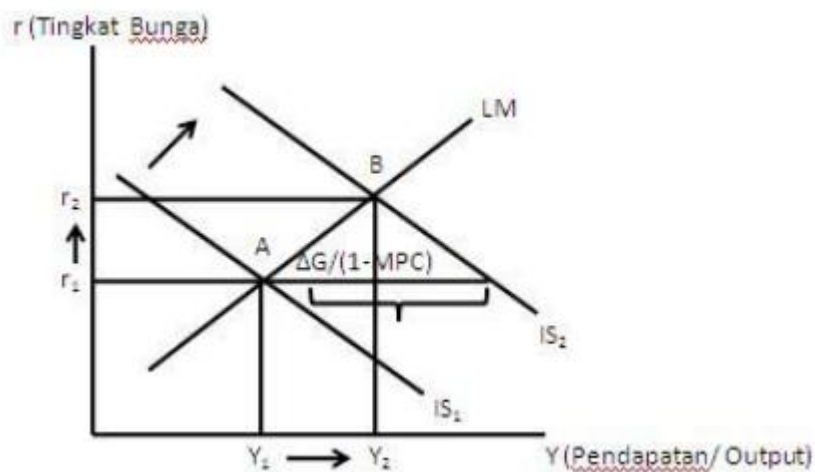
### **2.3.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di suatu daerah. Penghitungan PDRB menggunakan dua macam harga yaitu harga berlaku dan harga konstan. PDRB atas harga berlaku merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun bersangkutan, sementara PDRB atas dasar harga konstan dihitung dengan menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar dan saat ini menggunakan tahun 2000. Terdapat dua cara dalam metode perhitungan PDRB, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung terdapat beberapa pendekatan, diantaranya adalah pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran, sedangkan metode tidak langsung adalah dengan menghitung nilai tambah suatu kelompok ekonomi dengan mengalokasikan nilai tambah ke dalam masing-masing kelompok kegiatan ekonomi pada tingkat regional. Sebagai alokator digunakan yang paling besar tergantung atau erat kaitannya dengan produktivitas kegiatan ekonomi tersebut.

Pemakaian masing-masing metode pendekatan sangat tergantung pada data yang tersedia. Pada kenyataannya, pemakaian kedua metode tersebut akan saling menunjang satu sama lain, karena metode langsung akan mendorong peningkatan kualitas data daerah, sedangkan metode tidak langsung akan merupakan koreksi dalam pembandingan bagi data daerah

## 2.4 Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah termasuk ke dalam kebijakan fiskal bersama dengan pajak. Perubahan pengeluaran pemerintah ini akan mengubah ekuilibrium jangka pendek perekonomian. Perubahan fiskal akan memengaruhi pengeluaran yang direncanakan dan menggeser kurva IS. Model IS LM menunjukkan bagaimana pergeseran dalam kurva IS ini memengaruhi pendapatan nasional dan tingkat bunga.



**Gambar 2.2 Kurva IS-LM**

Kenaikan pengeluaran pemerintah misalkan terjadi sebesar  $\Delta G$ . Pengganda pengeluaran pemerintah dalam perpotongan Keynesian menyatakan bahwa pada tingkat bunga berapapun, perubahan dalam kebijakan fiskal ini menaikkan pendapatan sebesar  $\Delta G / (1 - MPC)$ . Sebagaimana kurva diatas, kurva IS bergeser ke kanan sebesar jumlah ini. Ekuilibrium perekonomian bergerak dari titik A ke titik B,

kenaikan pengeluaran pemerintah akan meningkatkan pendapatan dan bunga. Pengeluaran yang direncanakan akan naik ketika pemerintah meningkatkan belanjanya atas barang dan jasa. Kenaikan pengeluaran yang direncanakan ini akan mendorong produksi barang dan jasa, yang menyebabkan pendapatan total  $Y$  meningkat.

#### **2.4.1 Belanja Modal**

Menurut Halim (2001), “Belanja Modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada Kelompok Belanja Administrasi Umum”. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 53 ayat 1 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah juga disebutkan bahwa Belanja Modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Menurut Syaiful (2006), Belanja Modal dapat dikategorikan dalam 5(lima) kategori utama:

#### 1. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/ pembelian/ pembebasan, penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

#### 2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

#### 3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/ biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian, termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

#### 4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian/ peningkatan, pembangunan/

pembuatan serta perawatan dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

#### 5. Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja Modal Fisik Lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian/ peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan dalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan termasuk dalam belanja ini adalah belanja kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku dan jurnal ilmiah.

### 2.5 Teori Peacock dan Wiseman

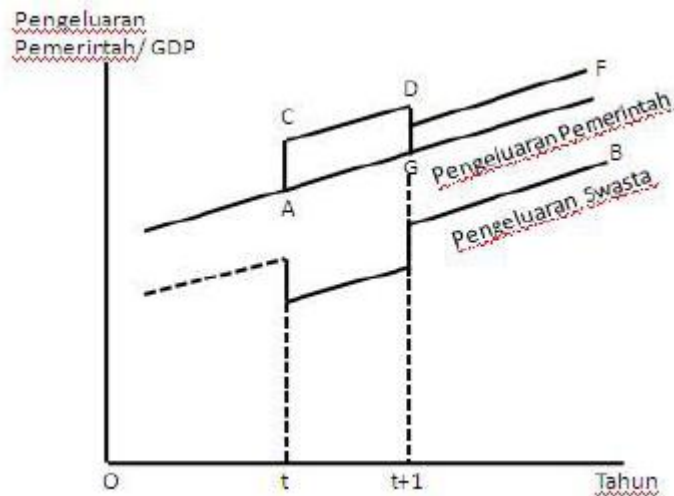
Teori ini didasarkan pada suatu analisis penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Pemerintah selalu berusaha memperbesar pengeluarannya dengan mengandalkan penerimaan dari pajak, padahal masyarakat tidak menyukai pembayaran pajak yang besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Dalam keadaan normal meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar.

Peacock dan Wiseman mendasarkan teori mereka pada situasi di mana masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat mentoleransi besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Jadi masyarakat menyadari bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai aktivitas pemerintah sehingga mereka mempunyai tingkat kesediaan masyarakat untuk membayar pajak. Tingkat toleransi ini merupakan kendala bagi pemerintah untuk menaikkan pemungutan pajak secara semena-mena. Dalam teori Peacock dan Wiseman terdapat efek penggantian (*displacement effect*) yaitu adanya gangguan sosial yang menyebabkan aktivitas swasta dialihkan pada aktivitas pemerintah. Pengentasan gangguan tidak hanya cukup dibiayai semata-mata dengan pajak sehingga pemerintah harus meminjam dana dari luar negeri.

Setelah gangguan teratasi muncul kewajiban melunasi utang dan membayar bunga. Pengeluaran pemerintah yang semakin bertambah bukan hanya karena GNP bertambah tetapi karena adanya kewajiban baru tersebut. Akibat lebih lanjut adalah pajak tidak menurun kembali ke tingkat semula meskipun gangguan telah berakhir.

Selain itu, masih banyak aktivitas pemerintah yang baru kelihatan setelah terjadinya perang dan ini disebut efek inspeksi (*inspection effect*). Adanya gangguan sosial juga akan menyebabkan terjadinya konsentrasi kegiatan ke tangan pemerintah yang sebelumnya dilaksanakan oleh swasta. Efek inilah disebut sebagai efek konsentrasi (*concentration effect*). Dengan adanya ketiga efek tersebut menyebabkan

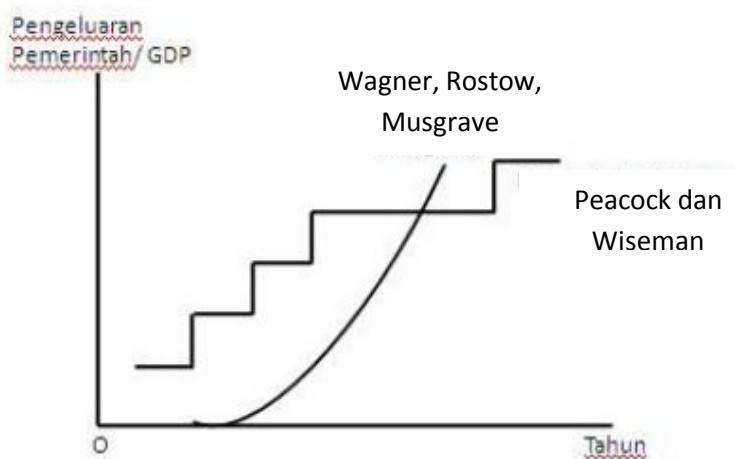
bertambahnya aktivitas pemerintah sehingga setelah perang selesai tingkat pajak tidak menurun kembali pada tingkat sebelum terjadi perang. Adanya dampak eksternal tadi digambarkan dalam bentuk kurva di bawah ini.



**Gambar 2.3 Kurva dalam Teori Peacock dan Wiseman**

Dalam keadaan normal,  $t$  ke  $t+1$ , pengeluaran pemerintah dalam persentase terhadap GNP meningkat sebagaimana yang ditunjukkan garis AG. Apabila pada tahun  $t$  terjadi perang maka pengeluaran pemerintah meningkat sebesar AC dan kemudian meningkat seperti yang ditunjukkan pada segmen CD. Setelah perang selesai pada tahun  $t+1$ , pengeluaran pemerintah tidak menurun ke G. Hal ini disebabkan setelah perang, pemerintah membutuhkan tambahan dana untuk mengembalikan pinjaman pemerintah yang digunakan dalam pembiayaan pembangunan.

Berbeda dengan pandangan Wagner, perkembangan pengeluaran pemerintah versi Peacock dan Wiseman tidaklah berbentuk suatu garis, seperti kurva di bawah, tetapi berbentuk seperti tangga.



**Gambar 2.4 Kurva Perkembangan Pengeluaran Pemerintah**

Pengeluaran pemerintah menurut teori Wagner, Rostow, dan Musgrave digambarkan dalam bentuk kurva yang eksponensial, sedangkan teori Peacock dan Wiseman mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah jika digambarkan dalam kurva seperti bentuk tangga. Hal ini dikarenakan adanya kendala toleransi pajak. Ketika masyarakat tidak ingin membayar pajak yang tinggi yang ditetapkan pemerintah, maka pemerintah tidak bisa meningkatkan pengeluarannya, walaupun pemerintah ingin senantiasa menaikkan pengeluarannya. Di sisi lain ada fenomena di mana

penerimaan pemerintah yang terbatas seiring dengan pengeluaran daerah yang semakin meningkat, fenomena ini disebut *Fiscal Stress*.

## 2.6 Tekanan Fiskal (*Fiscal Stress*)

Tidak ada definisi *Fiscal Stress* yang diterima secara universal. Sehingga para peneliti membuat definisi sendiri yang mampu menjawab tujuan penelitian mereka dengan mempertimbangkan ketersediaan data (Arnett, 2011). Banyak definisi dan indikator *Fiscal Stress* yang diajukan oleh berbagai penelitian di luar negeri. Arnett (2011) menyebutkan bahwa *Fiscal Stress* merupakan tekanan anggaran (fiskal) yang terjadi sebagai akibat keterbatasan penerimaan daerah yang dapat memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Dimana tekanan keuangan (*Fiscal Stress*) menjadi semakin tinggi dikarenakan adanya tuntutan peningkatan kemandirian yang ditujukan dengan meningkatnya penerimaan sendiri untuk membiayai berbagai pengeluaran yang ada. Ketersediaan sumber-sumber daya daerah potensial dan kesiapan daerah menjadi faktor penting keberhasilan dalam era otonomi. Menurut (Sobel dan Holcombe, dalam Adi dan Setyawan (2008), mengemukakan bahwa terjadinya krisis keuangan disebabkan tidak cukupnya penerimaan atau pendapatan dalam memenuhi kebutuhan pengeluaran. Daerah-daerah yang tidak memiliki kesiapan dalam era otonomi bisa mengalami hal yang sama, dimana tekanan keuangan (*Fiscal Stress*) yang menjadi semakin tinggi.

Menurut Arnett (2011) literatur tentang kondisi keuangan dan pengukuran *fiscal tress* menekankan beberapa isu yang perlu dipertimbangkan dalam pengukuran

*Fiscal Stress* dalam spektrum kondisi keuangan publik. Terdapat 5 kategori besar pengukuran *Fiscal Stress* di tingkat daerah (state) yang dikaji oleh Arnett (2011), antara lain: defisit anggaran (*budget deficits*), saldo anggaran akhir tahun yang tidak dicadangkan (*year-end unreserved budget balance*), penurunan atas kinerja penerimaan pemerintah daerah (*decline in states's revenues performance*), peningkatan pajak relatif terhadap trend pengeluaran (*tax increases relative to spending trends*) dan rasio keuangan (*financial ratios*). Hasil kajian Arnett (2011) menekankan bahwa *Fund Balance* (Saldo Dana = selisih penerimaan dan pengeluaran) adalah penting dalam penentuan indikator (ukuran) *Fiscal Stress* karena dianggap mewakili kemampuan pemerintah untuk terus bertahan beroperasi meskipun dalam kondisi ekonomi yang mengalami permasalahan finansial sekalipun. Pemerintah daerah yang memiliki Saldo Dana (*fund balance*) masih mampu bertahan beroperasi untuk menyerap dampak negatif dari permasalahan finansial tersebut. Dalam spektrum kondisi keuangan publik, *Fiscal Stress* dapat dikategorikan sebagai kondisi keuangan publik yang lemah (*weak financial condition*).



**Gambar 2.5 Spektrum Kondisi keuangan publik (Arnett, 2011)**

Dongori (2006) menyatakan bahwa dampak diberlakukannya undang-undang otonomi daerah dan dikeluarkannya undang-undang No. 34 tahun 2000 yang membatasi pungutan pajak daerah dapat memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap penerimaan daerah. Ketersediaan sumber-sumber daya potensial dan kesiapan daerah menjadi faktor penting keberhasilan daerah dalam era otonomi ini. Keuangan daerah, terutama pada sisi penerimaan bisa menjadi tidak stabil dalam memasuki era otonomi ini. Sobel dan Holcombe dalam Andayani (2004) mengemukakan bahwa terjadinya krisis keuangan disebabkan tidak cukupnya penerimaan atau pendapatan dalam memenuhi kebutuhan pengeluaran.

Shamsub dan Akoto (2004) mengelompokkan penyebab timbulnya *Fiscal Stress* ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu:

1. Menekankan bahwa peran siklus ekonomi dapat menyebabkan *Fiscal Stress*. Penyebab utama terjadinya *Fiscal Stress* adalah kondisi ekonomi seperti pertumbuhan yang menurun dan resesi.
2. Menekankan bahwa ketiadaan perangsang bisnis dan kemunduran industri sebagai penyebab utama timbulnya *Fiscal Stress*. Yu dan Korman (1987) dalam Shamsub dan Akoto (2004) menemukan bahwa kemunduran industri menjadikan berkurangnya hasil pajak tetapi pelayanan jasa meningkat, hal ini dapat menyebabkan *Fiscal Stress*.

3. Menerangkan bahwa *Fiscal Stress* sebagai fungsi politik dan faktor-faktor keuangan yang tidak terkontrol. Ginsberg dalam Shamsud dan Akoto (2004) menunjukkan bahwa sebagian dari peran ketidakefisienan birokrasi, korupsi, gaji yang tinggi untuk pegawai, dan tingginya belanja untuk kesejahteraan sebagai penyebab *Fiscal Stress*.

### **2.6.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap *Fiscal Stress***

Iskandar Muda (2012) menunjukkan bahwa Pertumbuhan PAD memiliki dampak atas *Fiscal Stress* suatu daerah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pertumbuhan penerimaan daerah (dalam hal ini PAD) mempengaruhi tingkat *Fiscal Stress* pada suatu daerah. Adanya perubahan (kenaikan/penurunan) dari komponen penerimaan daerah akan menyebabkan perubahan tingkat *Fiscal Stress* yang dialami oleh daerah tersebut. Terkait dengan hal itu, penelitian Iskandar Muda (2012) merinci bahwa komponen dari sektor penerimaan dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) yang berpengaruh secara signifikan terhadap kondisi *Fiscal Stress* adalah proporsi retribusi daerah, sedangkan proporsi pajak daerah relatif tidak terpengaruh, bahkan proporsinya sedikit naik dalam komposisi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Purnaninthesa (2006) juga mendukung temuan yang menyatakan bahwa *Fiscal Stress* berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah. Purnaninthesa (2006) menyimpulkan bahwa *Fiscal*

*Stress* di suatu daerah mendorong dan memotivasi daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya guna mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan antara pertumbuhan penerimaan daerah (PAD) dengan fenomena *Fiscal Stress*.

### **2.6.2 Pengaruh Belanja Modal terhadap *Fiscal Stress***

Dalam menghadapi otonomi daerah, pemerintah daerah harus lebih meningkatkan pelayanan publiknya. Upaya ini akan terus mengalami perbaikan sepanjang didukung oleh tingkat pembiayaan daerah yang memadai. Alokasi belanja yang memadai untuk peningkatan pelayanan publik diharapkan memberikan timbal balik berupa peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah, baik yang berasal dari retribusi, pajak daerah maupun penerimaan lainnya.

Dongori (2006) memberikan gambaran empirik bahwa terjadi perbedaan tingkat pembiayaan sesudah era otonomi daerah lebih besar dibandingkan dengan sebelumnya. Perubahan pembiayaan ini lebih banyak disebabkan adanya tuntutan peningkatan pelayanan publik yang ditunjukkan dengan peningkatan alokasi ataupun terjadi pergeseran belanja untuk kepentingan-kepentingan pelayanan publik secara langsung, dalam hal ini belanja pembangunan.

Belanja pembangunan seperti pembangunan infrastruktur pada jangka pendek akan memperbesar anggaran belanja daerah. Hal ini jika tidak diimbangi dengan

penerimaan yang cukup signifikan (besar) maka dapat menimbulkan *Fiscal Stress* yang cukup serius, mengingat *Fiscal Stress* di sini dicerminkan adanya ketidakseimbangan anggaran penerimaan dengan pengeluaran. Pada jangka panjang dengan peningkatan kualitas infrastruktur suatu daerah pada gilirannya mempunyai harapan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di masa yang akan datang. Hal ini membuktikan bahwa pertumbuhan belanja daerah dapat mempengaruhi *Fiscal Stress*.

### **2.6.3 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) terhadap *Fiscal Stress***

Tujuan utama dari desentralisasi fiskal adalah terciptanya kemandirian daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan lokal, khususnya melalui PAD (Sidik, 2002). Daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan PAD yang positif mempunyai kemungkinan untuk memiliki tingkat pendapatan per kapita yang lebih baik. PAD berkorelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi (diukur dengan PDRB) di daerah (Brata, 2004). PAD merupakan salah satu sumber penerimaan daerah. Jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk membiayai aktifitasnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik juga akan lebih tinggi. Pada gilirannya, tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula. Pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi-potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan PDRB. Pertumbuhan PAD

secara berkelanjutan akan menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah itu.

Peningkatan PAD harus berdampak pada perekonomian daerah (Saragih, 2003). Oleh karena itu, daerah tidak akan berhasil bila daerah tidak mengalami pertumbuhan ekonomi yang berarti meskipun terjadi peningkatan penerimaan PAD. Bila yang terjadi sebaliknya, maka bisa diindikasikan adanya eksploitasi PAD terhadap masyarakat secara berlebihan tanpa memperhatikan peningkatan produktifitas masyarakat itu sendiri. Sidik (2002) menegaskan bahwa keberhasilan peningkatan PAD hendaknya tidak hanya diukur dari jumlah yang diterima, tetapi juga diukur dengan perannya untuk mengatur perekonomian masyarakat agar dapat lebih berkembang, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Pada gilirannya harapan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dapat terpenuhi. Dalam hal ini melalui peningkatan PAD maka pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan PDRB memberikan pengaruh terhadap *Fiscal Stress*.

## **2.7 Review Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian terdahulu yang terkait dan inspirasi bagi penelitian ini terkait dengan variabel – variabel yang diteliti dan korelasinya dalam menjelaskan fenomena *Fiscal Stress*. Inspiransi utama dari studi ini adalah penelitian Iskandar Muda (2012) dan studi dari Arnett (2011). Studi ini mengadopsi variabel – variabel penelitian yang digunakan oleh Iskandar Muda (2012) dengan menggunakan ukuran

*Fiscal Stress* yang dianjurkan oleh Arnett (2011). Adapun *review* penelitian terdahulu selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini:

**Tabel 2.1 Review Penelitian Terdahulu**

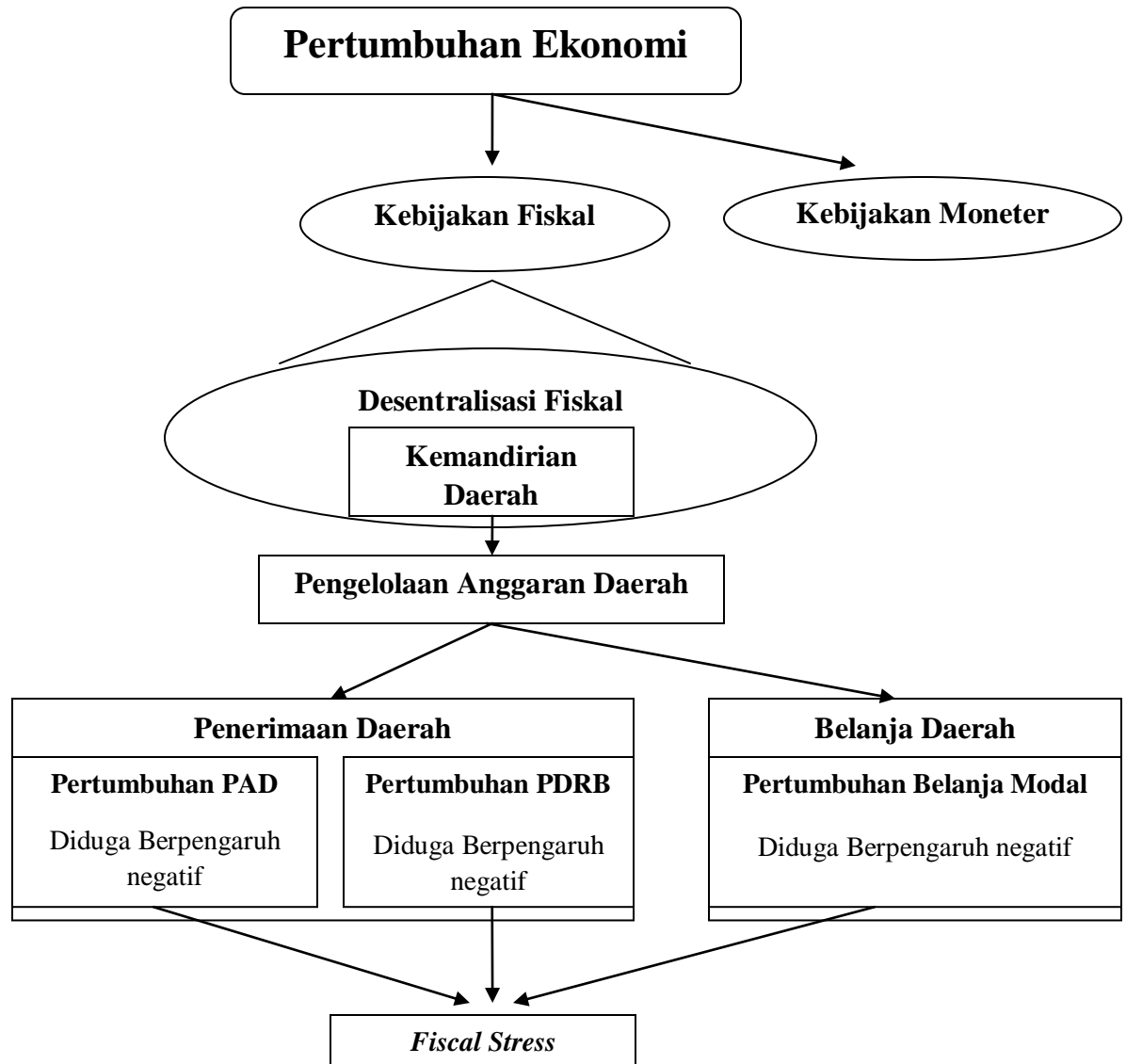
No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Haryadi (2002)	Analisis Pengaruh <i>Fiscal Stress</i> terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Menghadapi Pelaksanaan Otonomi Daerah	<i>Fiscal Stress</i> Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah	<i>Fiscal Stress</i> secara signifikan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/kota di Jawa Timur sebelum dan sesudah krisis
2.	Andayani (2004)	Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Deskriptif atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Terjadi perubahan rata-rata pendapatan dan belanja daerah sebelum dan sesudah adanya krisis. Pada masa krisis ekonomi, rata-rata pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota mengalami penurunan yang signifikan. Penerimaan daerah yang tidak stabil selama krisis ekonomi menyebabkan adanya kondisi <i>Fiscal Stress</i>
3.	Nanga (2005)	Disparitas Fiskal di Indonesia	Uji Beda dengan variabel PAD dan Pertumbuhan Ekonomi	Adanya disparitas (kapasitas) fiskal yang tinggi antar daerah memasuki era otonomi

4.	Kamna Lal dan Benedict Jimenez (2007)	<i>Assessing the Impact of Fiscal Stress on Capital Debt Financing : Evidence from the States</i>	<i>Political variables, fiscal and budgetary institutions, demographic factors, and economic variables on capital debt financing</i>	<i>The influence of political variables, fiscal and budgetary institutions, demographic factors, and economic variables on capital debt financing</i>
5.	Ravi Balakrishnan, Stephan Danninger, Selim Elekdag, And IrinaTytell (2009)	<i>The Transmission of Financial Stress from Advanced to Emerging Economies</i>	<i>Financial crises, financial stress index, emerging economies</i>	<i>Past banking sector financial stress in advanced economies implies that the decline capital flows may be large and drawn-out</i>
6.	S. B. Arnett (2011)	<i>Fiscal Stress in the US. States: An Analysis of Measures and Responses</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>budget deficits,</i></li> <li>• <i>year-end un-reserved budget balance,</i></li> <li>• <i>declines in state revenue performance,</i></li> <li>• <i>tax increases relative to spending trends</i></li> <li>• <i>financial ratios.</i></li> </ul>	<i>Fund Balance (Saldo Dana) merupakan indikator penting dalam pengukuran Fiscal Stress karena mencerminkan kemampuan pemerintah untuk terus bertahan beroperasi meskipun dalam kondisi ekonomi yang sulit sekalipun.</i>

7.	Iskandar Muda (2012)	Variabel yang Mempengaruhi <i>Fiscal Stress</i> pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara	Pertumbuhan PAD, Pertumbuhan PDRB, dan Pertumbuhan Belanja Modal	Variabel Pertumbuhan Belanja Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Fiscal Stress</i> pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara
----	-------------------------	---	--	--

## 2.8 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kajian literatur di atas, maka kerangka pemikiran yang dapat dikembangkan adalah sebagai berikut:



Disadari bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu diikuti dengan peningkatan pemerataan kesejahteraan masyarakatnya, maka pemerintah dalam

upaya menselaraskan pertumbuhan ekonomi (fungsi alokasi) dengan pemerataan kesejahteraan (fungsi distribusi) digunakan instrumen kebijakan fiskal dan moneter. Dalam era otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk dapat membiayai barang dan pelayanan publik warga masyarakatnya dengan penggalan potensi sumber – sumber penerimaan daerahnya yang diikuti dengan pengaturan pengeluaran anggaran yang bijaksana. Berdasarkan studi terdahulu diketahui bahwa pertumbuhan PAD, pertumbuhan PDRB (sisi penerimaan) dan pertumbuhan Belanja Modal (sisi pengeluaran) berpengaruh pada *Fiscal Stress* yang diukur dari selisih antara penerimaan (PAD) dan pengeluaran (Belanja Daerah). Dengan instrumen kebijakan fiskal di tingkat daerah yaitu mencermati pertumbuhan (PAD, PDRB dan Belanja Modal), maka dapat *Fiscal Stress* dapat diantisipasi, dikontrol atau bahkan direduksi.

## **2.9 Hipotesis Penelitian**

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori. Hipotesis dirumuskan atas dasar kerangka pikir yang merupakan jawaban sementara atas masalah yang dirumuskan (Sugiyono, 2009).

Hipotesis yang dapat dirumuskan berdasarkan latar belakang adalah sebagai berikut:

1. Diduga Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial berpengaruh negatif terhadap *Fiscal Stress* Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
2. Diduga Pertumbuhan belanja modal secara parsial berpengaruh negatif terhadap *Fiscal Stress* Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
3. Diduga Pertumbuhan ekonomi (PDRB) secara parsial berpengaruh negatif terhadap *Fiscal Stress* Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
4. *Fiscal Stress* antar periode pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah diduga berbeda secara statistik.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Definisi Operasional dan Variabel Penelitian

Dalam studi ini digunakan dua jenis variabel penelitian, yaitu variabel dependen atau variabel tak bebas (*dependent variable*) dan variabel independen atau variabel bebas (*independent variable*).

##### 1. Variabel Dependen

Merupakan variabel yang besarnya dipengaruhi oleh variabel lain. Dalam penelitian ini tekanan fiskal (*Fiscal Stress*) digunakan sebagai variabel dependen. *Fiscal Stress* mencerminkan ketidakmampuan pemerintah untuk memenuhi standar operasi, hutang, kebutuhan masyarakat, dan sumber daya dari tahun ke tahun secara berturut-turut. Definisi lain adalah suatu kondisi dimana terjadi ketidakseimbangan di antara pelayanan publik yang diinginkan dengan yang disediakan oleh pemerintah, dengan kata lain adalah adanya ketidakseimbangan antara penerimaan dengan pengeluaran. Pada konteks nasional, ketidakseimbangan anggaran dapat digambarkan melalui *budget deficit* yaitu selisih antara total penerimaan dengan total pengeluaran. Jika dianalogikan pada konteks daerah daerah maka pada sisi penerimaan digunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai proksi dari sisi penerimaan, dengan pertimbangan bahwa PAD selain merupakan salah satu sumber penerimaan daerah juga sekaligus sebagai indikator kemandirian daerah. Semakin besar PAD

maka ketergantungan daerah dengan dana perimbangan dari pusat semakin kecil. Maka jika terjadi guncangan anggaran dari pusat, dapat dikatakan tidak berpengaruh signifikan pada anggaran daerah. Pada sisi belanja daerah digunakan total belanja daerah sebagai proksi dari sisi pengeluaran. Total belanja menunjukkan seberapa besar daerah menganggarkan dananya untuk pembangunan daerah. Semakin tinggi ketidakseimbangan anggaran daerah maka dapat dikatakan *Fiscal Stress* semakin tinggi. Ukuran ketidakseimbangan anggaran daerah ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Arnett (2011). Arnett (2011) menyebutkan bahwa *Fund Balance* (Saldo Dana) merupakan indikator/ukuran penting yang mengindikasikan suatu daerah mampu mengontrol *Fiscal Stress* atau tidak. Semakin positif *Fund Balance* (Penerimaan Daerah > Total Belanja Daerah) maka semakin kecil kemungkinannya daerah itu mengalami *Fiscal Stress*.

Dalam studi ini, perhitungan *Fiscal Stress* dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\mathbf{Fiscal\ Stress = PAD - Total\ Belanja}$$

## 2. Variabel Independen

### A. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah yang berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain. Pertumbuhan pendapatan asli daerah dijadikan sebagai variabel untuk melihat bagaimana perkembangan capaian sumbangan daerah dalam total penerimaan pemerintah dalam periode penelitian. Pertumbuhan pendapatan asli

daerah dapat diukur berdasarkan PAD tahun yang dicari (t) dikurangi PAD t-1 (tahun sebelumnya) dibagi dengan PAD tahun sebelumnya. Pertumbuhan PAD dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\mathbf{PPAD (t) = (PAD_t - PAD_{t-1})/PAD_{t-1} \times 100}$$

Keterangan:

PPAD (t) = Pertumbuhan Pendapatan Daerah periode t

PAD (t) = Pendapatan Asli Daerah periode t

PAD (t-1) = Pendapatan Asli Daerah periode t-1

#### B. Pertumbuhan Product Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di suatu daerah. Pertumbuhan Product Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat diukur berdasarkan PDRB periode t dikurangi PDRB periode t-1 (tahun sebelumnya) dibagi dengan PDRB periode t-1 (tahun sebelumnya). Maka PDRB dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\mathbf{PPDRB (t) = (PDRB_t - PDRB_{t-1})/PDRB_{t-1} \times 100 \%}$$

Keterangan :

PPDRB (t) = Pertumbuhan Ekonomi periode t

PDRB<sub>t</sub> = PDRB periode t

PDRB<sub>t-1</sub> = PDRB periode t-1

### C. Pertumbuhan Belanja Modal/Pembangunan

Belanja Modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah asset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada Kelompok Belanja Administrasi Umum (Halim, 2004). Belanja modal adalah salah satu indikator pengeluaran pemerintah, semakin tinggi belanja modal maka semakin tinggi pengeluaran pemerintah. Namun sebaliknya, semakin tinggi pertumbuhan Belanja Modal, semakin tinggi potensi penerimaan pemerintah dapat diharapkan (*expected revenues*) di masa mendatang. Konsekuensinya, semakin rendah kemungkinan suatu daerah mengalami *Fiscal Stress*. Dalam penelitian ini pertumbuhan belanja modal digunakan sebagai variabel independen untuk mencermati bagaimana perkembangan belanja modal pemerintah dari tahun ke tahun. Pertumbuhan belanja modal diukur berdasarkan belanja modal periode t dikurangi dengan belanja modal periode t-1 (tahun sebelumnya) dibagi dengan belanja daerah periode t-1 (tahun sebelumnya). Maka pertumbuhan Belanja Modal dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\mathbf{PBM(t) = (BM_t - BM_{t-1})/BM_{t-1} \times 100 \%}$$

Keterangan :

PBM(t) = Pertumbuhan Belanja Modal periode t

BM(t) = Belanja Modal periode t

BM (t-1) = Belanja Modal periode t-1

### **3.2 Jenis dan Sumber Data**

Dalam penelitian yang dilakukan ini menggunakan sumber data sekunder yang didapatkan melalui studi literatur baik dari buku, jurnal, penelitian, serta sumber data terbitan beberapa instansi tertentu. Data yang digunakan merupakan data pool/data panel yaitu kombinasi dari data runtut waktu (*time series*) dan data silang (*cross section*).

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah:

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan harga konstan pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2008-2013.
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2008-2013.
3. Total Belanja Daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009-2013.
4. Belanja Modal pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2008-2013.

### **3.3 Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan secara dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian dari dinas, lembaga/instansi terkait. Data yang dikumpulkan diperoleh dari buku APBD yang

bersumber dari BPS Jawa Tengah. Periode data yang diamati adalah periode 2009 sampai dengan periode 2013.

### **3.4 Metode Analisis**

#### **3.4.1 Analisis Statistik Deskriptif**

Analisis Statistik Deskriptif merupakan teknik deskriptif yang memberikan informasi mengenai data yang dimiliki dan tidak bermaksud menguji hipotesis. Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah rata-rata, standar deviasi, maksimum dan minimum.

Mean digunakan untuk mengetahui rata-rata data yang bersangkutan. Standar deviasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar rata – rata data yang diobservasi berdeviasi terhadap sederetan data yang membentuk rata – rata tersebut. Dengan perkataan lain, seberapa jauh nilai rata – rata tersebut “representatif” (mewakili). Maksimum digunakan untuk mengetahui nilai maksimum data yang diobservasi. Minimum digunakan untuk mengetahui nilai terkecil data yang diobservasi.

#### **3.4.2 Analisis Regresi Berganda**

Analisis regresi berganda merupakan analisis regresi digunakan untuk mengamati hubungan antara satu variabel terikat (dependen variabel) dengan satu atau lebih variabel bebas (independen variabel). Metode analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh terhadap perubahan suatu variabel lainnya yang ada

hubungannya untuk menguji pengaruh PAD, Belanja modal, dan PDRB terhadap *Fiscal Stress* di Provinsi Jawa Tengah yang dapat digambarkan dalam persamaan sebagai berikut:

$$Fiscal\ Stress = f(PAD, PDRB, Belanja\ modal)$$

Kemudian fungsi tersebut ditransformasikan menjadi model regresi sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 PPAD + \beta_2 PPDRB + \beta_3 PPBM + e$$

Dimana :

$$Y = Fiscal\ Stress$$

$$\alpha = Konstanta$$

$$\beta = Slope\ atau\ koefisien\ regresi$$

$$PPAD = Pertumbuhan\ PAD$$

$$PPDRB = Pertumbuhan\ PDRB$$

$$PBM = Pertumbuhan\ Belanja\ Daerah$$

$$e = error$$

### 3.4.3 Analisis Regresi Data Panel

Analisis ini menggabungkan antara data time series dengan data *cross section* data. Dalam menggunakan panel data persamaan model dengan menggunakan data cross section dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \mu_i; i = 1, 2, \dots, N$$

Dimana:

- $Y_i$  = variabel dependen untuk *cross section*
- $X_i$  = variabel independen untuk *cross section*
- $\beta_0, \beta_1$  = konstanta
- $\mu_i$  = error untuk *cross section*
- $N$  = banyaknya data *cross section*

Sedangkan persamaan model *time series* adalah:

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_t + \mu_t; t = 1, 2, \dots, T$$

Dimana :

- $Y_t$  = variabel dependen untuk *time series*
- $X_t$  = variabel independen untuk *time series*
- $\beta_0, \beta_1$  = konstanta
- $\mu_t$  = error untuk *time series*
- $T$  = banyaknya data *time series*

Memahami bahwa data panel merupakan gabungan dari *cross section* dan *time series*, maka model panel dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{it} + \mu_{it}; i = 1, 2, \dots, N ; t = 1, 2, \dots, T$$

Dimana:

- $N$  = banyaknya *cross section*
- $T$  = banyaknya *time series*
- $N \times T$  = banyaknya data panel

Berikut ini merupakan keunggulan menggunakan panel data (Gujarati dan Porter, 2009):

- a. Data panel dapat lebih informatif, lebih bervariasi, mengurangi kolinieritas antar variabel, meningkatkan derajat kepercayaan (*degree of freedom*), dan lebih efisien.
- b. Lebih memuaskan untuk menentukan perubahan dinamis dibandingkan dengan studi *cross section*.
- c. Data panel dapat membantu studi untuk menganalisis perilaku yang lebih kompleks, misal fenomena skala ekonomi dan perubahan teknologi.
- d. Dapat meminimalkan bias yang dihasilkan oleh agregasi individu atau perusahaan karena unitnya lebih banyak.

Dalam penelitian ini analisis panel data yang digunakan adalah pendekatan efek tetap (*fixed effect method*) dengan menggunakan metode LSDV (*Least Square Dummy Variabel*).

#### **3.4.3.1 Analisis Regresi Data Panel dengan *Dummy Variable* (Least Squares Dummy Variable, LSDV)**

Dalam menganalisis pengaruh pertumbuhan PAD, PDRB, dan Belanja Modal terhadap *Fiscal Stress* digunakan analisis data panel *fixed effect* dengan metode *Least Squares Dummy Variable* (LSDV). Bentuk model efek tetap (FEM) dalam penelitian ini menggunakan *dummy* waktu untuk melihat bagaimana dinamika kondisi *Fiscal Stress* pada tahun 2009 hingga 2013. Data tahun 2012 digunakan sebagai acuan

(*benchmark*) dikarenakan pertumbuhan PAD, PDRB, dan Belanja Modal adalah yang paling baik dibandingkan tahun sebelum dan sesudahnya. Setelah menggunakan *dummy* waktu, maka model persamaannya menjadi sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 \text{PPAD} + \beta_2 \text{PPDRB} + \beta_3 \text{PPBM} + \beta_4 \text{D1} + \beta_5 \text{D2} + \beta_6 \text{D3} + \beta_7 \text{D4} + e$$

Dimana:

Y	= <i>Fiscal Stress</i>
$\alpha$	= Konstanta
$\beta$	= Slope atau koefisien regresi
PPAD	= Pertumbuhan PAD
PPDRB	= Pertumbuhan PDRB
PBM	= Pertumbuhan Belanja Daerah
D1	= <i>Dummy</i> Tahun 2009
D2	= <i>Dummy</i> Tahun 2010
D3	= <i>Dummy</i> Tahun 2011
D4	= <i>Dummy</i> Tahun 2013
e	= <i>error</i>

#### 3.4.4 Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui masalah-masalah dalam menganalisis data. Masalah tersebut dalam ekonometrika termasuk dalam pengujian asumsi klasik, yaitu ada tidaknya masalah multikolinearitas, autokorelasi,

heteroskedastisitas dan normalitas (Kuncoro, 2004). Pengujian asumsi klasik meliputi sebagai berikut:

#### **3.4.4.1 Uji Normalitas**

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ini variabel dependen dan independennya mempunyai distribusi normal atau tidak karena dalam model yang baik harus memiliki distribusi data yang normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Bila asumsi ini tidak terpenuhi maka uji statistik menjadi tidak berlaku (Ghozali, 2005). Terdapat beberapa cara untuk menguji residual antara lain Jarque-Bera (J-B) *Test* dan metode grafik. Di dalam penelitian ini menggunakan *JB Test* untuk mengetahui apakah distribusi residualnya berdistribusi normal. Jika nilai *Probability* Jarque-Bera lebih besar dari 5%, maka data dikatakan terdistribusi normal.

#### **3.4.4.2 Uji Multikolinearitas**

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara variabel independen dalam penelitian. Bila terdapat hubungan antar variabel maka terdapat permasalahan yang disebut multikolinieritas. Multikolinearitas tidak akan terjadi pada model yang sederhana (terdapat satu dependen dan variabel independen). Model yang baik seharusnya multikolinearitas tidak serius terjadi. Indikasi bahwa model tersebut terdapat multikolinearitas adalah  $R^2$  yang tinggi namun secara individu banyak

variabel independen tidak signifikan (Ghozali, 2005). Dalam penelitian ini uji multikolinearitas menggunakan *auxiliary regressions*. Kriterianya adalah R<sup>2</sup> regresi persamaan utama harus lebih besar dengan R<sup>2</sup> regresi *auxiliary*.

#### 3.4.4.3 Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah korelasi antara anggota-anggota serangkaian observasi yang diuraikan menurut waktu dan ruang (Gujarati, 1997). Konsekuensi adanya autokorelasi diantaranya adanya selang keyakinan menjadi lebar serta variasi dan standar error terlalu rendah.

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Salah satu cara yang digunakan untuk mendeteksi autokorelasi adalah dengan uji Breusch-Godfrey (*BG Test*). Kemudian dilakukan pengujian dalam hipotesa sebagai berikut:

Ho:  $\rho = 0$ , tidak ada masalah autokorelasi

Ha:  $\rho \neq 0$ , ada masalah autokorelasi

Selanjutnya nilai chi square hitung (nilai *Obs\*R-squared*) dibandingkan dengan  $\alpha$  (0,05). Dimana  $\alpha$  (0,05) adalah kritis *chi square* yang ada dalam tabel

statistik *chi square*. Jika *chi square* hitung (nilai *Obs\*R-square*) lebih besar dari *chi square*, maka terdapat masalah autokorelasi, dan jika sebaliknya maka tidak terjadi masalah autokorelasi.

#### **3.4.4.4 Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya dalam model regresi. Bila terbukti bahwa varians dalam pengamatan tidak sama antar pengamatan satu dengan yang lainnya, maka terjadi heteroskedastisitas. Model yang baik adalah model yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Permasalahan heteroskedastisitas tidak menyebabkan model menjadi bias, namun menyebabkan model tidak lagi memiliki varians yang efisien atau yang minimum. Hal ini menyebabkan asumsi *best* dalam BLUE tidak dapat tercapai. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas studi ini menggunakan uji Glejser. Uji Glejser dilakukan dengan meregresi nilai absolut residual sebagai variabel dependen dengan semua variabel independen yang digunakan di dalam model penelitian ini. Jika variabel independen memiliki nilai signifikansi kurang dari 5% ( $\alpha < 0,05$ ) maka terjadi masalah heteroskedastisitas. Sebaliknya jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 ( $\alpha > 0,05$ ) maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

### 3.4.5 Pengujian Statistik

#### 3.4.5.1 *Goodness of Fit* ( $R^2$ )

$R^2$  bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh variasi variabel independen dapat menerangkan dengan baik variasi variabel dependennya. Untuk mengukur kebaikan suatu model (*goodness of fit*) dengan digunakan koefisien determinasi ( $R^2$ ). Koefisien determinasi ( $R^2$ ) merupakan angka yang memberikan proporsi atau persentase variasi total dalam variabel tak bebas (Y) yang di jelaskan oleh variabel bebas (X) (Gujarati, 1997). Nilai  $R^2$  yang sempurna adalah satu (dalam penelitian ini 100 persen), yaitu apabila keseluruhan variasi dependen dapat dijelaskan sepenuhnya oleh variabel independen yang dimasukkan dalam model.

Dimana  $0 < R^2 < 1$  sehingga kesimpulan yang dapat diambil adalah:

- Nilai  $R^2$  yang kecil atau mendekati nol, berarti kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel tidak bebas dan sangat terbatas.
- Nilai  $R^2$  mendekati satu, berarti kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan hampir semua informasi yang digunakan untuk memprediksi variasi variabel tidak bebas.

#### 3.4.5.3 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama, digunakan uji F dengan hipotesis sebagai berikut:

$$H_0: \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = \beta_5 = \beta_6 = \beta_7 = 0.$$

$H_1$ : Tidak semua koefisien regresi secara simultan sama dengan nol.

Apabila nilai  $F$  hitung  $>$   $F$  tabel maka  $H_0$  ditolak dan menerima  $H_1$ . Artinya ada pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Sebaliknya apabila,  $F$  hitung  $<$   $F$  tabel maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Artinya tidak ada pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2005).

#### 3.4.5.2 Uji Statistik t

Uji statistik t dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual (parsial) dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2005). Untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

1.  $H_0: \beta_1 \leq 0$ , yaitu tidak ada pengaruh variabel PPAD terhadap variabel *Fiscal Stress*.  
  
 $H_1: \beta_1 > 0$ , yaitu terdapat pengaruh positif signifikansi variabel PPAD terhadap variabel *Fiscal Stress*.
2.  $H_0: \beta_2 \leq 0$ , yaitu tidak ada pengaruh variabel PPDRB terhadap variabel *Fiscal Stress*.

H<sub>1</sub>:  $\beta_2 > 0$ , yaitu terdapat pengaruh positif variabel PPDRB terhadap variabel *Fiscal Stress*.

3. H<sub>0</sub>:  $\beta_3 \leq 0$ , yaitu tidak ada pengaruh variabel PBM terhadap variabel *Fiscal Stress*.

H<sub>1</sub>:  $\beta_3 < 0$ , yaitu terdapat pengaruh negatif variabel PBM terhadap variabel *Fiscal Stress*.

Uji t ini dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel. Apabila  $|t_{hitung}| > t_{tabel}$ , maka hipotesis alternatif diterima yang menyatakan bahwa variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen. Sebaliknya apabila  $|t_{hitung}| < t_{tabel}$  maka variabel independen secara individual tidak mempengaruhi variabel dependen.